

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Penelitian tentang pengaruh kejelasan anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah membutuhkan beberapa kajian teori untuk menguatkan penelitian antara lain:

1. Teori *Stewardship*

Menurut Donaldson & Davis (1991), teori *stewardship* adalah teori yang menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* (pimpinan) harus menjalankan tujuan organisasi yang telah di rencanakan. Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori *stewardship* mengasumsikan hubunga antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan mellindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup.

Dalam pemerintahan, pemerintah berlaku sebagai *steward* dan rakyat sebagai pemiliknya. Pemerintah akan selalu bekerja keras untuk kepentingan bersama, karena pemerintah merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional. Hal tersebut dikarenakan *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai kesuksesan organisasi kepuasan pemilik (rakyat).

2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Menurut Maryanto (2007:1) pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah: “Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan Inpres no 7 tahun 1999 “Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.” Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik. Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003.

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip – prinsip sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
- b. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumberdaya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

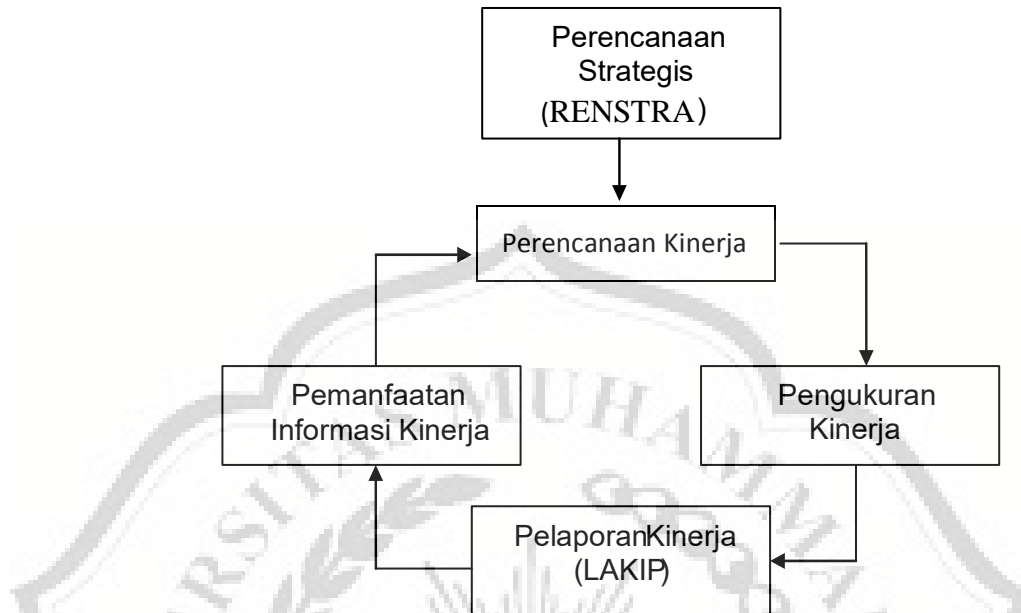
- c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Jujur, objektif, transparan, dan akurat.
- f. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap - tahap sebagai berikut:

- a. Penetapan perencanaan strategis.
- b. Pengukuran kinerja.
- c. Pelaporan kinerja.
- d. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Pusdiklatwas BPKP, 2013

Gambar 2.1 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada gambar diatas, dimulai dari penyusunan perencanaan stratejik (Renstra) yang meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Perencanaan stratejik ini kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat setiap tahun. Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (*output/outcome*) dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk

suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja. Dalam melaksanakan kegiatan, dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja. Data kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untuk pengukuran kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data kinerja, yaitu tatanan, instrumen, dan metode pengumpulan data kinerja. Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan.

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. Demikian pula inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur sehingga dapat diciptakan pemerintah yang baik.

5. Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran pemerintah merupakan salah satu cara implementasi akuntansi manajemen yang menjadi alat penting dalam melakukan alokasi sumberdaya di pemerintah. Menurut Freeman (2003) anggaran adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya pada kebutuhan kebutuhanyang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*) mengungkapkan peran strategis anggaran dalam kekayaan sebuah organisasi politik (Nordiawan,deddi). Kenis (Andarias, 2009) menyatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku pegawai. Pelaksana anggaran akan menjadi bingung dan tidak puas dalam bekerja jika terdapat ketidakjelasan sasaran anggaran sehingga menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Kenis juga menyatakan bahwa anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan, pengendalian biaya dan pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, sisi lain anggaran juga merupakan alat bagi manajerial SKPD untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya.

6. Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi merupakan suatu proses dimana manajemen suatu organisasi membuat keyakinan yang beralasan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai misi dan rencana organisasi, pelaporan keuangan andal, kebijakan hukum,

dan peraturan yang relevan diikuti. Sistem pengendalian yang menggunakan informasi informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Pengendalian dan laporan akuntansi mengenai operasi merupakan bagian dari suatu rencana yang terpadu dengan baik untuk memelihara efisiensi dan menetapkan penyimpangan atau trends yang tidak memuaskan (Setiawan, 2017).

Menurut Mardiasmo (2009:35) mengungkapkan fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Selain itu., dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan (*financial control*) dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi (*organization control*). Pengendalian akuntansi diperlukan untuk menyusun rencana, metode, dan prosedur organisasi untuk menjaga kekayaan instansi dan reliabilitas data keuangan. Melalui pengendalian akuntansi yang baik, akan terusun pelaksanaan kinerja keuangan dengan baik sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan (wahid, 2016).

7. Sistem Pelaporan

Terdapat tiga tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu akuntabilitas, manajerial, dan transparansi. Akuntabilitas diartikan sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber

daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. Manajerial berarti menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, utang, dan ekuitas dana. Kusumaningrum (2013) Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Hilmi, 2004). BPKP (2011) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Berikut akan disajikan beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain yang mengkaji mengenai kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Reni Yulianti (2014)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian	dependen : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Independen : Kejelasan Sasaran	kejelasan sasaran anggaran, kesulitan sasaran Anggaran, pengendalian akuntansi, dan

		Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan)	Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan.	sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah,
2	Putri (2009)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	dependen: Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Independen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan.	kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah atas akuntabilitas kinerja, sedangkan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan tidak menunjukkan adanya pengaruh
3	Apriadi (2010)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah.	dependen : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Independen : Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi	kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap kinerja akuntabilitas instansi pemerintah.

4	Beny Arifin W (2012)	Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi	dependen : Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Independen : Partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan	Partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebelum dimoderasi komitmen organisasi
6	Harini Susilowati (2014)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Motivasi Kerja	dependen : Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Independen : Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Motivasi Kerja	kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sedangkan tiga variabel lain yang diteliti yaitu pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
7	Mei anjarwati	Pengaruh	dependen :	Kejelasan

(2012)	Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Independen : Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan	sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
--------	---	--	--

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Kejelasan sasaran anggaran merujuk pada tingkat dimana sasaran anggaran adalah dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dipahami oleh pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhinya. Dari penelitian yang dilakukan oleh emilia (2014) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Dalam pengoptimalisasi dibutuhkan kejelasan sasaran kegunaanya. Anggaran yang tidak diketahui saranya akan mengakibatkan tidak sesuai kegunaan dari anggaran yang semula direncanakan. Sasaran anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran

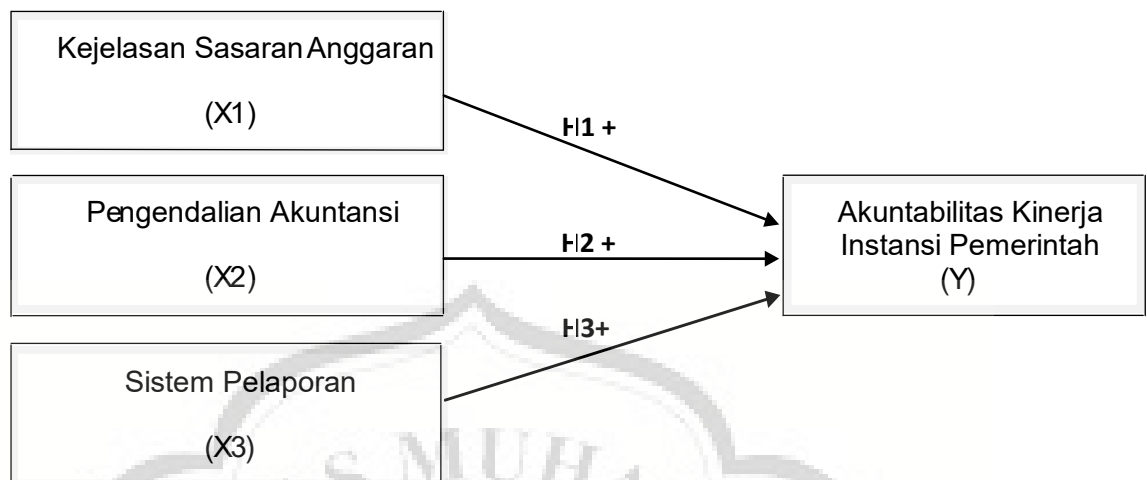
daerah dapat menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Dengan demikian, kejelasan sasaran anggaran akan mempengaruhi kinerja pemerintah.

2. Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Menurut Anthony (2005:3) pengendalian adalah suatu perangkat yang mengukur dan menilai apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dilakukan, sedangkan pengendalian akuntansi pada suatu organisasi adalah untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas finansial dari aktivitas-aktivitas organisasi. Menurut Mardiasmo (2009:35) mengungkapkan fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Selain itu., dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan (*financial control*) dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi (*organization control*). Hasil penelitian Fauzan(2017) menunjukkan pengendalian akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deaerah

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dilakukan terhadap atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Hilmi, 2004). BPKP (2011) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Penelitian yang dilakukan oleh Wahid (2016) menunjukkan bahwa secara parsial sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ylianti dkk (2014) dan Herawaty (2011) yang menyatakan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan dari landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

D. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Menurut Kenis (1979) dalam Munawar (2006) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu, sasaran anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan

melaksanakan kegiatan anggaran. Ketidakjelasan sasaran anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi (Suhartono dan Mochammad, 2006). Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kejelasan sasaran anggaran didefinisikan sebagai gambaran keluasaan anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya (Kenis, 1979). Dari penjelasan diatas dan hasil penelitian dari Mei Anjarwati AAJ 1 (2) (2012) Asmorowati (2010), Anna (2010), dan Lita (2011). menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

H1 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

2. Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah

Pengendalian akuntansi didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang efektif bagi kinerja yang lebih baik (Darma, 2004). Variabel pengendalian akuntansi diukur dengan menggunakan 6 instrumen butir pertanyaan yang dikembangkan oleh Myah dan Mia (1996). Manchitos

dalam Hilmi (2004) mengatakan bahwa sistem akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam spektrum mekanisme kontrol keseluruhan yang digunakan untuk memotivasi, mengukur, dan memberi sanksi tindakan-tindakan para manajer dan karyawan di suatu organisasi. Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepala instansi pemerintah daerah membuat keputusan- keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi dengan lebih efektif dan efisien (Hilmi, 2005). Komitmen organisasi yang kuat di dalam diri individu akan menyebabkan individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tujuan dan kepentingan organisasinya (Angel dan Perry, 1981; Porter *et al.* 1974 Darlis, 2000). Dari penjelasan diatas dan hasil penelitian dari Abdullah (2004), Andi (2008), (Beny Arifin W), Herlaksono (2010) dan Anna (2010), Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

H2 : Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

3. Pengaruh sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah

Sistem pelaporan adalah seberapa sering laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibuat (Andi, 2008). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan umpan balik (*feedback*)

diperlukan untuk mengukur aktivitas aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya (Kusumaningrum, 2010). Dari penjelasan di atas dan hasil penelitian dari Reni Yulianti (2014) dan sejalan dengan penelitian terdahulu Netty Herawaty (2011), Indraswari Kusumaningrum (2010), Hilmi Abdullah (2004) sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

H3 : Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah